

Memahami Hak Dan Kewajiban Warga Negara: Sebuah Kajian Perspektif Siswa Melalui Pendekatan Diskusi Kelompok

Vira Permata Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: vpermatasari@student.umrah.ac.id

Ririn Julian Tika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: rjuliantika@student.umrah.ac.id

Try Audyta Rezky Rahmadani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: taudytarezkyrahmadani@student.umrah.ac.id

Abstract: *Although every individual has knowledge about the rights and responsibilities as a citizen to a certain extent, these rights and responsibilities are often neglected due to the busy life in society. Education is very important for every country because it serves as the main marker in assessing the extent to which the country can maintain the welfare, protection, and fulfillment of primary, secondary, and tertiary needs of its citizens. In Indonesia, regulations that establish the right of every citizen to obtain education are regulated in Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The purpose of this discussion is to improve the understanding of society and students about the rights and duties of every citizen in building a good country, as well as to raise awareness of the importance of respecting the rights of others and carrying out their obligations. Therefore, this journal is a qualitative research that uses data collection techniques through group discussions and literature reviews.*

Keywords: Rights; Obligations; Education; Responsibility

Abstrak: Meskipun setiap individu memiliki pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara hingga batas tertentu, hak dan tanggung jawab tersebut sering kali diabaikan karena kesibukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan sangat penting bagi setiap negara karena berfungsi sebagai penanda utama dalam menilai sejauh mana negara tersebut dapat menjaga kesejahteraan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier warganya. Di Indonesia, peraturan yang menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan siswa tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membangun negara yang baik, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajiban mereka. Oleh sebab itu, jurnal ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui diskusi kelompok dan kajian literatur.

Kata kunci: Hak; Kewajiban; Pendidikan; Tanggung jawab

PENDAHULUAN

Setiap individu memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara sampai batas tertentu, namun karena banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan bernegara, hak dan tanggung jawab tersebut sering kali dilupakan. Terkadang kadang dalam kehidupan negara, ada perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara. Seringkali, kewajiban warga negara lebih ditekankan daripada hak-hak mereka.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki komponen penting yaitu masyarakat. Dalam suatu negara Masyarakat memainkan peran penting. Negara memiliki tanggung jawab dan hak terhadap warganya, begitu juga sebaliknya, warga negara juga

Received Mei 11, 2024; Accepted Juni 12, 2024; Published Agustus 31, 2024

* Vira Permata Sari, vpermatasari@student.umrah.ac.id

memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negaranya. Karena keterkaitan antara hak dan tanggung jawab ini, keduanya harus dijalankan secara seimbang. Hak merupakan hal yang pantas dan harus diakui, sementara tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Ketidakseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu timbulnya konflik dan pertikaian.

Menyadarkan semua orang akan rasa tanggung jawab kita terhadap hak dan kewajibannya terhadap negara yang menjadi prioritas. Jika seorang warga negara tidak menyadari haknya, orang lain dapat menyalahgunakan hak tersebut. Demikian juga dengan kurangnya kesadaran akan tugas dan kewajiban sebagai warga negara dapat mengakibatkan pelanggaran dan pengabaian terhadap hak-hak orang lain

Setiap negara membutuhkan Pendidikan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pendidikan berfungsi sebagai pengukur utama seberapa baik suatu negara menjaga kesejahteraan, perlindungan, dan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang yang menegaskan setiap warga negara berhak untuk bisa mendapatkan Pendidikan yang ada di dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945

Sebagai warga negara, kita diharuskan untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menanamkan sikap mencintai tanah air dan menghargai kebudayaan, pengetahuan tentang wilayah nusantara, dan semangat ketahanan nasional dalam diri kita.

Metode Penelitian

Studi ini adalah suatu penelitian kualitatif yang menerapkan metode pengumpulan data, termasuk diskusi kelompok dan kajian literatur, yang mengacu pada sumber-sumber yang menyoroti signifikansi pemahaman siswa terhadap hak dan tanggung jawab warga negara. Harapannya, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang betapa pentingnya hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan kewajiban warga negara

Identitas suatu negara terdiri dari elemen-elemen seperti populasi, wilayah, juga pemerintahan. Masyarakat merupakan bagian dari populasi suatu negara, dan status mereka membawa tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang saling terhubung. Hubungan antara negara dan warga negara adalah fundamental karena berdampak pada hak, kewajiban, serta kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Memahami hak dan tanggung jawab sebagai masyarakat di negara sendiri adalah penting bagi setiap individu untuk memastikan

penghargaan terhadap hak-hak mereka sendiri dan orang lain, serta pelaksanaan tanggung jawab mereka.

Bentuk dari hubungan masyarakat terhadap negaranya adalah bagaimana seorang warga negara dapat berperan dan selalu memberikan saran kritik demi kemajuan bangsanya dalam segala bidang dan aspek. Hak dan kewajiban yang jelas bagi warga negara diatur dalam undang-undang, khususnya dalam Pasal 27 hingga 34 UUD 1945, yang menguraikan hak dan kewajiban warga negara secara rinci.

Setiap individu memiliki hak sebagai anggota negara sejak lahir. Semua orang memiliki hak-hak yang harus diakui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak-hak yang penting termasuk hak untuk hidup yang cukup, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih arah kehidupan sendiri. Jika setiap warga negara mematuhi kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab, mereka berhak untuk menikmati hak-hak tersebut. Hak-hak ini umumnya diperoleh melalui pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut. Semua individu yang menjadi anggota negara berhak menggunakan hak-hak mereka, termasuk hak untuk bertindak sesuai dengan hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa hal ini hanya berlaku jika tidak ada pelanggaran terhadap hak orang lain, hukum, keteraturan sosial, atau norma-norma moral masyarakat.

Dalam konteks ini, hak tidak selalu memiliki hubungan dengan kewajiban, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Kewajiban harus dilaksanakan secara sadar dan bergantung pada situasi serta kemampuan individu yang bertanggung jawab. Meskipun memiliki makna yang serupa, hukum memegang peran yang berbeda. Kewajiban dapat didefinisikan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh warga negara. Kewajiban merupakan tindakan yang harus diambil atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kemampuannya.

Upaya terbaik untuk menjamin hak dan tanggung jawab seseorang adalah dengan memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara keduanya dalam semua aspek kehidupan. Tanggung jawab seorang warga negara menyiratkan bahwa mereka harus memenuhi kewajiban mereka. Setelah menerima hak, seseorang harus merasa bertanggung jawab. Kesadaran akan tanggung jawab harus dikembangkan seiring dengan pengakuan hak dan kewajiban, sehingga pikiran seseorang tidak hanya terfokus pada pemenuhan hak-hak orang lain, tetapi juga pada tugas atau kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara, baik dalam lingkup pribadi, sosial, nasional, maupun internasional.

2. Pemahaman dan sikap siswa terhadap hak dan kewajiban warga negara

Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya terencana untuk mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam masyarakat. Menurut J.J. Cogan dalam bukunya "Citizen Education" (1998), pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang membentuk keseluruhan warga negara, baik melalui jalur formal maupun informal, seperti dalam keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media, dan sumber lainnya. Intinya, pendidikan kewarganegaraan adalah alat yang memungkinkan warga negara menjalankan kewajibannya dengan cerdas dan aktif. Pendidikan politik juga melibatkan peran pihak luar, tidak terbatas pada pelajaran di sekolah saja.

Pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara dapat diimplementasikan secara efektif melalui beberapa tahap. Pertama, guru menjelaskan konsep hak dan kewajiban. Kedua, siswa diberi pertanyaan mengenai hal tersebut. Selanjutnya, guru membentuk kelompok diskusi agar siswa bisa berdialog satu sama lain. Penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan relevan diharapkan dapat meningkatkan minat siswa terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta membantu mereka memahami bagaimana materi ini dapat diterapkan di rumah, sekolah, dan masyarakat umum.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban harus dimulai sejak dini, tidak hanya pada usia dewasa. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah, dengan menggunakan media pembelajaran, membantu siswa memahami hubungan antara hak dan kewajiban. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai seperti toleransi, partisipasi aktif, tanggung jawab sosial, dan rasa memiliki terhadap negara.

Seorang siswa dianggap memiliki sikap terpuji jika ia sadar akan hak dan kewajibannya, baik sebagai siswa maupun sebagai warga negara. Pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan sesuai dengan hakikat kewarganegaraan. Tanggung jawab kewarganegaraan siswa diwujudkan melalui tindakan dan perilaku moral yang menunjukkan pemenuhan tugas kewarganegaraan dan pengabdian kepada negara. Siswa yang bertanggung jawab akan mengikuti dan melaksanakan aturan tanpa paksaan, sehingga kehidupan berjalan dengan aman, tenteram, dan baik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan langkah penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban warga negara dievaluasi secara berkala melalui tes, proyek, atau diskusi kelas. Evaluasi ini membantu guru menilai sejauh mana siswa telah memahami hak dan kewajiban warga negara.

SIMPULAN

Keterkaitan antara negara dan warga negara memiliki sifat saling mempengaruhi. Mengikutsertakan hak dan kewajiban yang berkaitan erat. Pemahaman dan penghargaan terhadap hak serta pelaksanaan kewajiban adalah penting untuk kesejahteraan dan keadilan. Hak warga negara, seperti hak atas kehidupan yang cukup dan kebebasan beragama, harus dijamin tanpa mengabaikan hak-hak individu lain. Kewajiban, yang bergantung pada tanggung jawab dan kemampuan individu, harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Menyimpan proporsi antara hak dan tanggung jawab menjadi kunci utama dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab di berbagai bidang kehidupan. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah penting dalam mempersiapkan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan ini melibatkan serangkaian langkah pembelajaran yang mencakup penjelasan, diskusi, dan penggunaan beragam media pembelajaran inovatif untuk mengajarkan hak dan kewajiban warga negara. Memahami hak dan tanggung jawab di negaranya sendiri harus ditanamkan sejak kecil dan dievaluasi secara teratur melalui proyek, ujian, atau diskusi kelas pada waktu di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk nilai-nilai seperti toleransi, partisipasi aktif, tanggung jawab sosial, dan rasa memiliki terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad., Intan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta
- Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2020). *Penyuluhan hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta*. Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 5(1), 51-64. <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/download/138/59>
- Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (n.d.). *IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KARAKTER MAHASISWA*. Indigenous Knowledge, 2(3), 246-253. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79393/pdf>
- Pratama., et al. (2016), *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*. Mitra Wacana Media. Jakarta. Hal 69.
- Rezeki., Sri. (2011), *Mengenal Hak dan Kewajiban*: PT Wadah Ilmu. Jakarta Timur. 9-10.